

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT

MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR!

TAHUN 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Barat

Laporan Tahunan

Nomor B-808/32000/KP.600/2025

tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

di

Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024



Tim Pengelola

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2024 di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan pengaduan publik sepanjang tahun 2024. Laporan ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai proses penerimaan, penanganan, hingga penyelesaian laporan yang masuk pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Aplikasi LAPOR!. Kami juga menyertakan evaluasi atas kinerja sistem tersebut selama periode pelaporan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Harapannya, laporan ini dapat menjadi referensi bagi peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pengelolaan dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 5 Maret 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat,



Darwis Sitorus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan Laporan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
BAB II SOSIALISASI SP4N-LAPOR!	4
2.1. Sosialisasi di BPS Provinsi Jawa Barat	4
2.2. Sosialisasi melalui Media Sosial	5
2.3. Sosialisasi pada Pelayanan Statistik Terpadu	5
2.4. Sosialisasi di Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota.....	6
2.4.1. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bogor.....	7
2.4.2. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Sukabumi	7
2.4.3. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Cianjur	7
2.4.4. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bandung	8
2.4.5. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Garut	8
2.4.6. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Tasikmalaya.....	8
2.4.7. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Ciamis	9
2.4.8. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Kuningan	9
2.4.9. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Cirebon	9
2.4.10. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Majalengka	10
2.4.11. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Sumedang	10
2.4.12. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Indramayu	10
2.4.13. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Subang.....	11
2.4.14. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Purwakarta	11
2.4.15. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Karawang	10
2.4.16. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bekasi	12
2.4.17. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bandung Barat.....	12
2.4.18. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Pangandaran.....	12
2.4.19. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bogor	13
2.4.20. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Sukabumi	13
2.4.21. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bandung	13
2.4.22. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Cirebon	14

2.4.23. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bekasi	14
2.4.24. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Depok	14
2.4.25. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Cimahi	15
2.4.26. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Tasikmalaya.....	15
2.4.27. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Banjar.....	15
BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN	16
3.1. Jumlah Laporan	16
3.2. Penanganan Pengaduan	18
BAB IV PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Hambatan dan Saran	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat baik dalam bentuk pelayanan pengaturan maupun dalam bentuk lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah selaku pemberi pelayanan publik sudah seharusnya lebih komunikatif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh sudah merupakan tugas dari pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah dalam pengelolaan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga atau kelompok yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Pada saat ini, masyarakat menuntut pemerintah sebagai penyedia layanan agar lebih terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Pemerintah juga dituntut untuk mengakomodir partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sehingga hal ini dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan *good governance* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ialah melalui adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem ini dirancang sebagai *platform* terintegrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara cepat dan mudah melalui berbagai saluran, seperti *website*, aplikasi *mobile*, media sosial, dan *call center*. SP4N-LAPOR! Tidak hanya memfasilitasi pengaduan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan karena seluruh proses dapat dipantau oleh publik, mulai dari pengajuan pengaduan hingga penyelesaiannya. Sistem ini mempermudah koordinasi antar instansi dalam menindaklanjuti pengaduan yang memerlukan penanganan lintas sektor, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. Selain itu, data yang dihasilkan dari pengelolaan pengaduan

melalui SP4N-LAPOR! Menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan perbaikan layanan di masa depan.

SP4N-LAPOR! Telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat, yaitu memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara tepat waktu, sehingga mendukung terciptanya pelayanan statistik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi SP4N-LAPOR! di lingkungan BPS Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pengaduan. BPS Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim yang bertanggung jawab dalam memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui sistem ini. Selain itu, sosialisasi internal telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola dan merespons pengaduan masyarakat dengan tepat. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian pengaduan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan statistik secara keseluruhan, sehingga BPS Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data di tingkat nasional.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan yang mendasari pengelolaan pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

1.3. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui banyaknya aduan dari masyarakat dan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di BPS Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024, dengan fokus pada efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan dan tindak lanjut yang diberikan terhadap pengaduan yang masuk. Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan pengaduan, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPS.

1.4. Ruang Lingkup

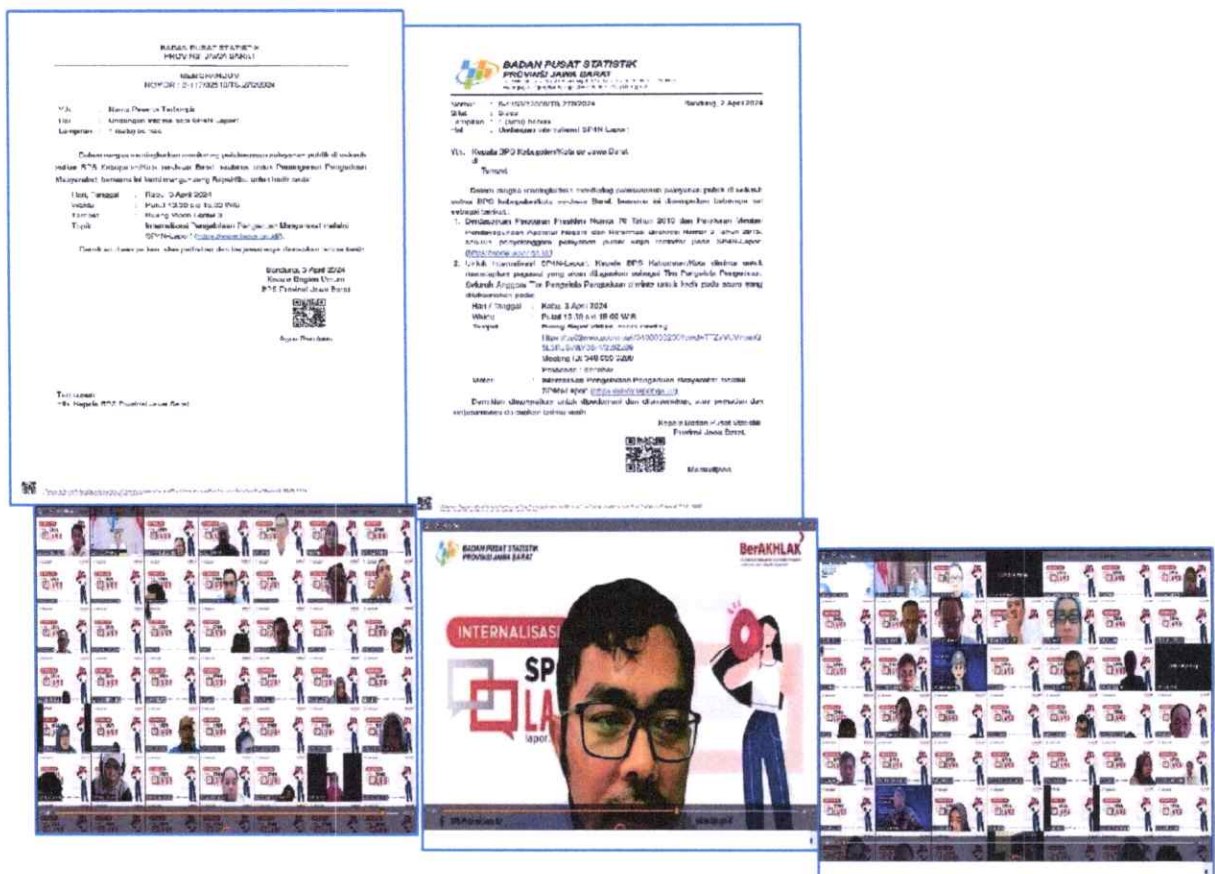
Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2024, termasuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, data pengaduan yang diterima dan tindak lanjut pengaduan.

BAB II

SOSIALISASI SP4N- LAPOR!

2.1. Sosialisasi di BPS Provinsi Jawa Barat

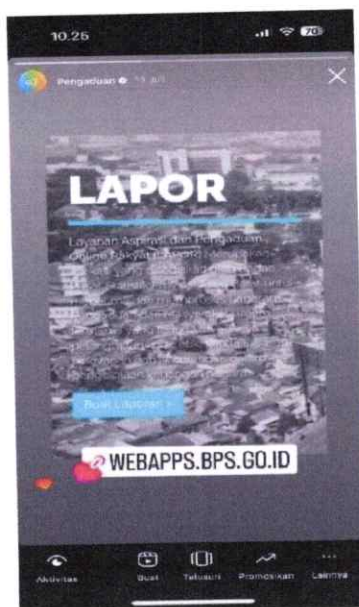
Dalam rangka meningkatkan monitoring pelaksanaan pelayanan publik di BPS Provinsi dan di seluruh satuan kerja BPS Kabupaten/Kota se Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi berupa internalisasi SP4N-LAPOR! Kegiatan ini dilaksanakan terutama untuk penanganan pengaduan masyarakat. Sosialisasi SP4N-LAPOR! dilaksanakan secara *hybrid* dimana diikuti oleh pegawai BPS Provinsi Jawa Barat dengan cara luring dan Pegawai BPS Kabupaten/Kota se Jawa Barat secara daring melalui *zoom meeting*. Peserta sosialisasi adalah Pegawai BPS Provinsi Jawa Barat dan Pegawai BPS Kabupaten/Kota se Jawa Barat yang ditugas sebagai Tim Pengelola Pengaduan. Adapun internalisasi SP4N LAPOR! Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 April 2024.



Gambar 1. Internalisasi SP4N LAPOR!

2.2. Sosialisasi melalui Media Sosial

BPS Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! melalui akun resmi Instagram BPS dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan *platform* media sosial ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses konten-konten informatif yang menjelaskan secara rinci tentang tata cara penyampaian pengaduan, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas, terutama dari kalangan pengguna aktif media sosial. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan dan manfaat dari aplikasi LAPOR!, serta terdorong untuk menggunakan *platform* tersebut dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saran mereka terkait dengan berbagai aspek pelayanan publik yang mereka terima, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan publik di BPS Provinsi Jawa Barat.

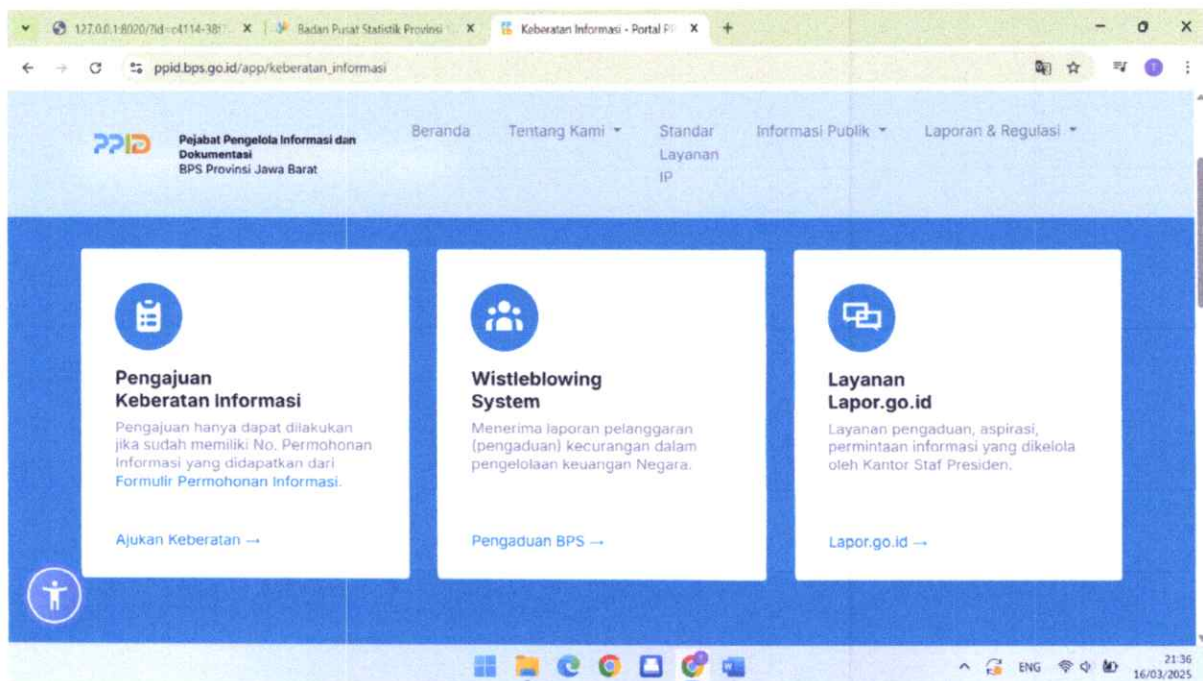


Gambar 2. Sosialisasi SP4N LAPOR! Pada Instagram BPS Provinsi Jawa Barat

2.3. Sosialisasi pada Pelayanan Statistik Terpadu

Selain melalui media sosial Instagram, BPS Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! melalui situs web PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik terpadu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan laporan terkait layanan yang diberikan oleh

BPS Provinsi Jawa Barat. Dengan integrasi SP4N-LAPOR, BPS Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta memastikan setiap laporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat dan cepat. Selain itu, kemudahan akses yang disediakan melalui website PPID, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan laporan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan statistik secara berkelanjutan. BPS Provinsi Jawa Barat berupaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan layanan ini demi tercapainya pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

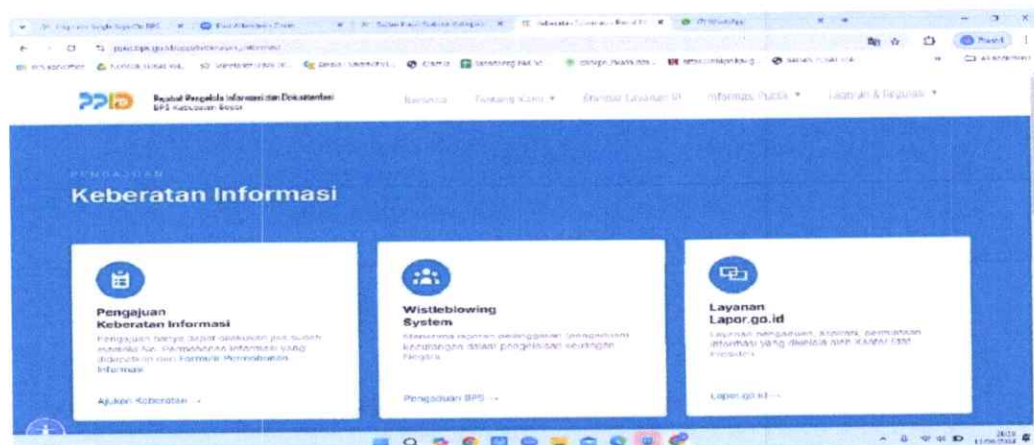


Gambar 3. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Provinsi Jawa Barat

2.4. Sosialisasi di Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota

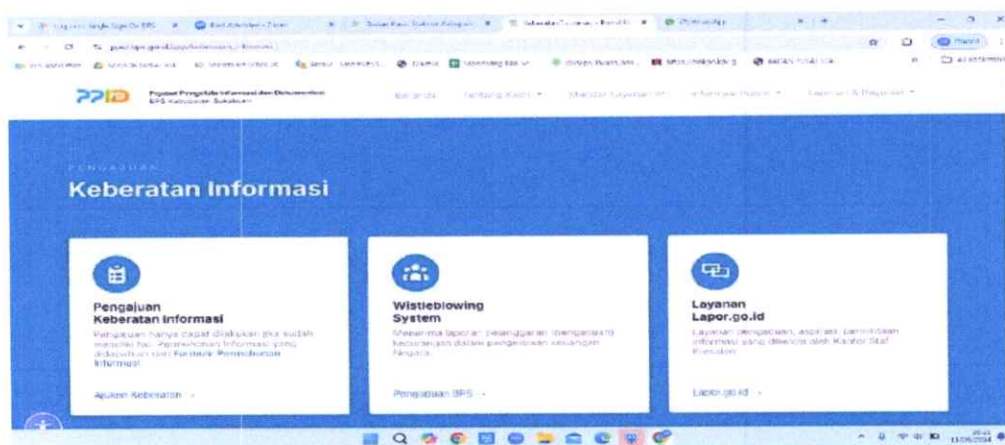
Sejalan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pun telah melakukan sosialisasi SP4N-LAPOR! melalui *website* PPID BPS Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar informasi adanya kanal pegaduan pelayanan dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat luas. Berikut disajikan bukti-bukti sosialisasi SP4N-LAPOR! melalui *website* PPID BPS Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

2.4.1. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bogor



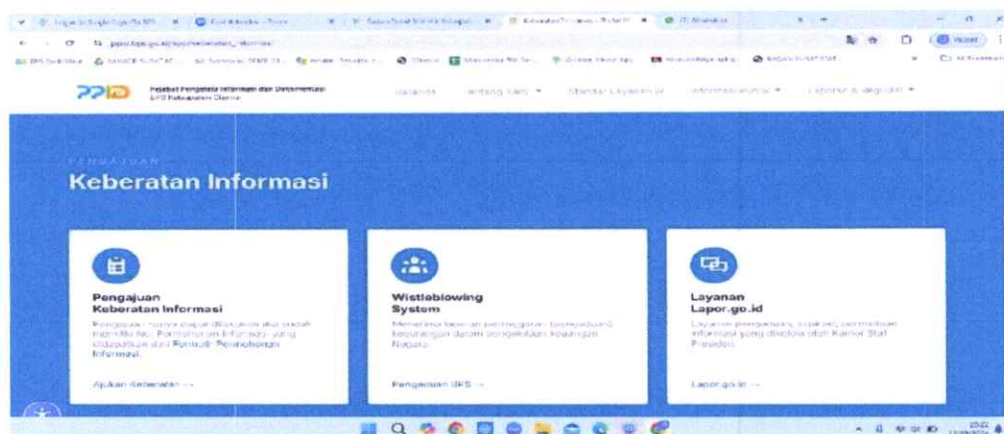
Gambar 4. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Bogor

2.4.2. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Sukabumi



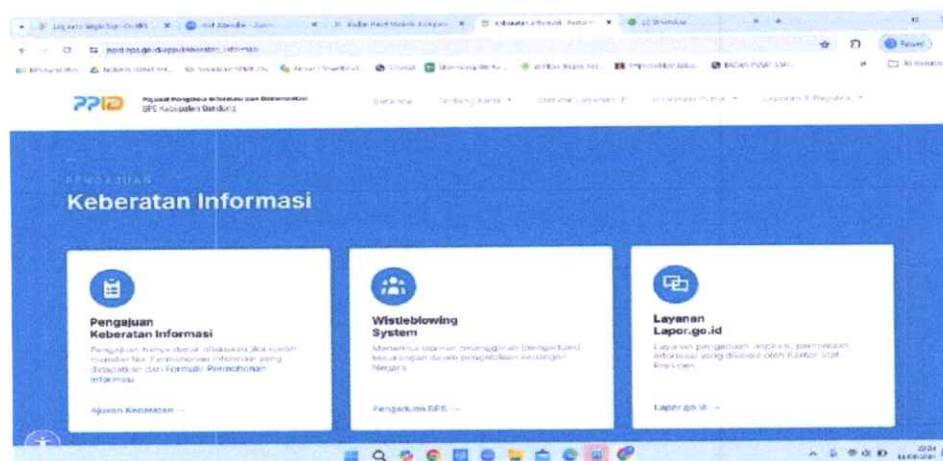
Gambar 5. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Sukabumi

2.4.3. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Cianjur



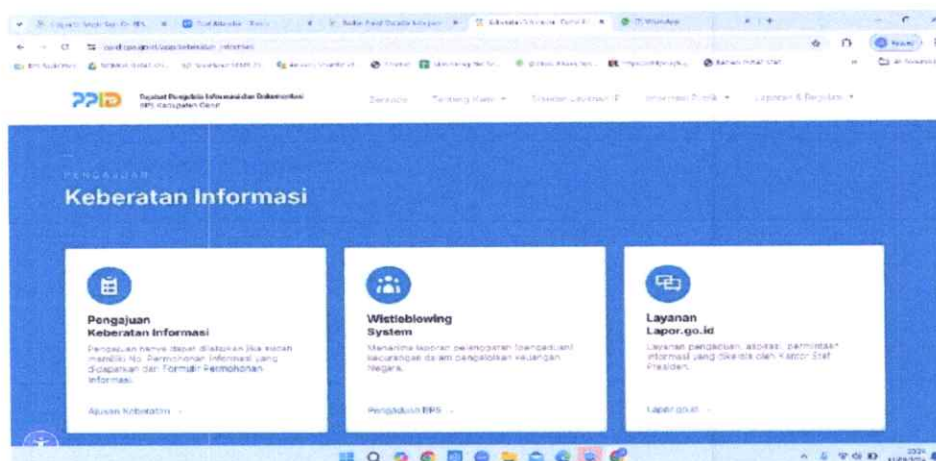
Gambar 6. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Cianjur

2.4.4. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bandung



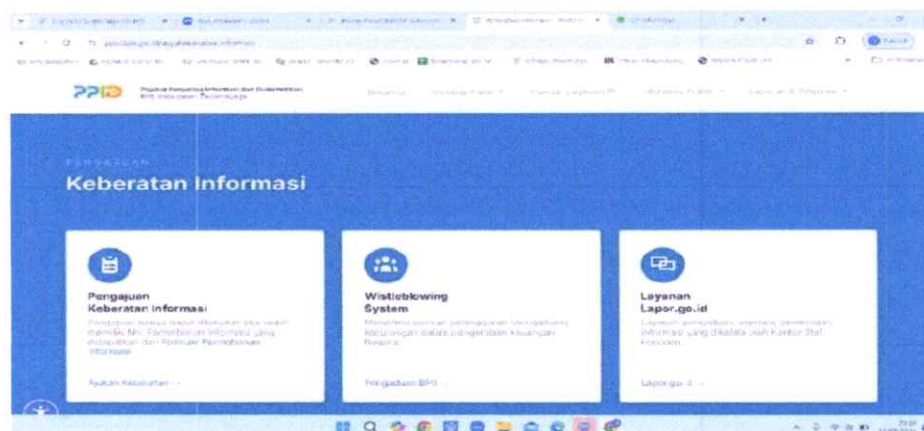
Gambar 7. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Bandung

2.4.5. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Garut



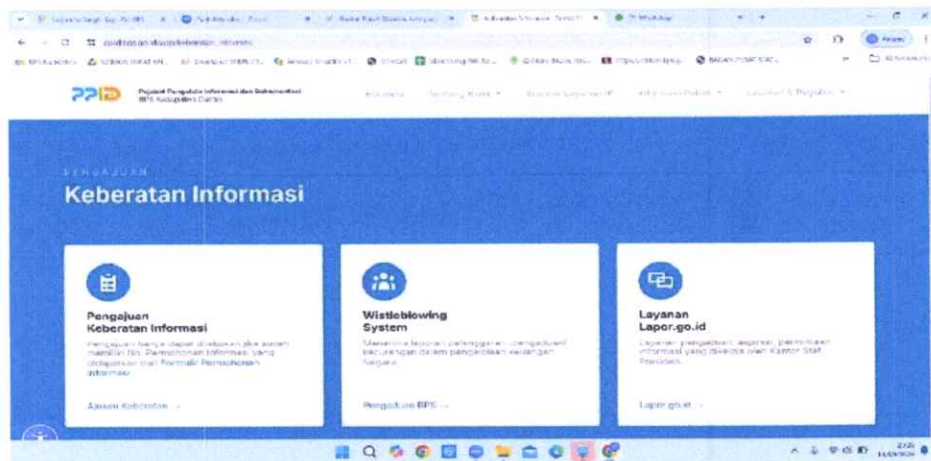
Gambar 8. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Garut

2.4.6. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Tasikmalaya



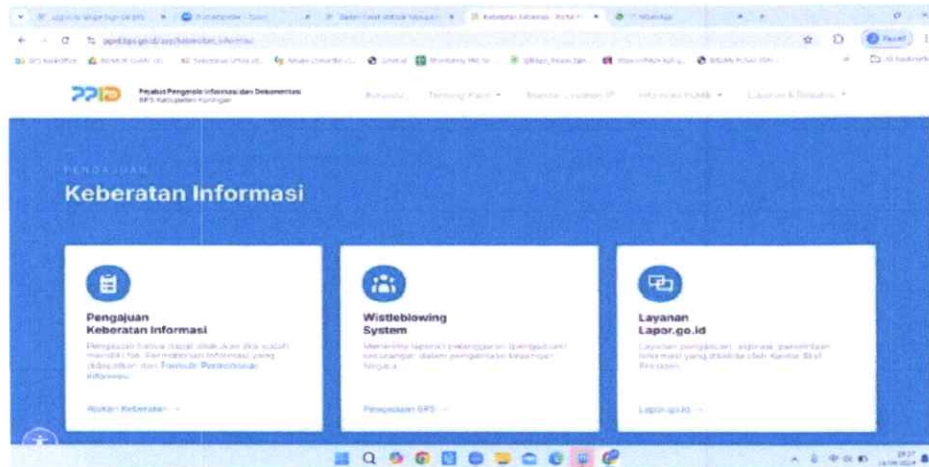
Gambar 9. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Tasikmalaya

2.4.7. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Ciamis



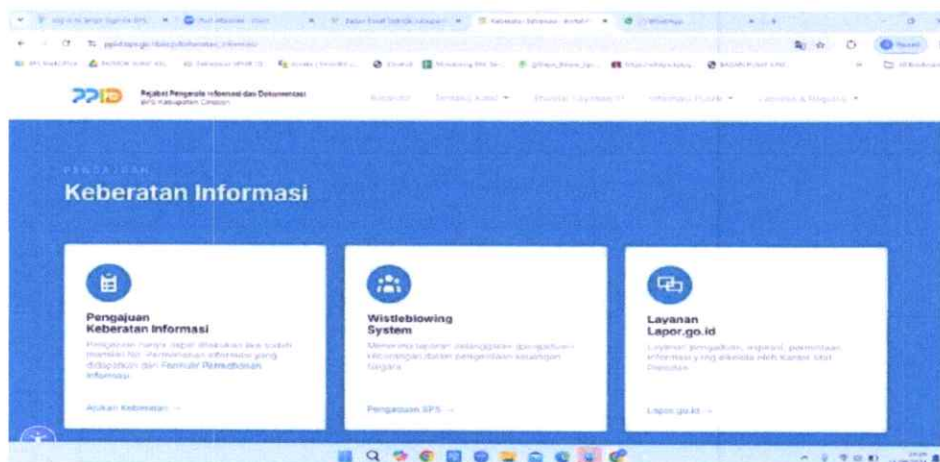
Gambar 10. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Ciamis

2.4.8. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Kuningan



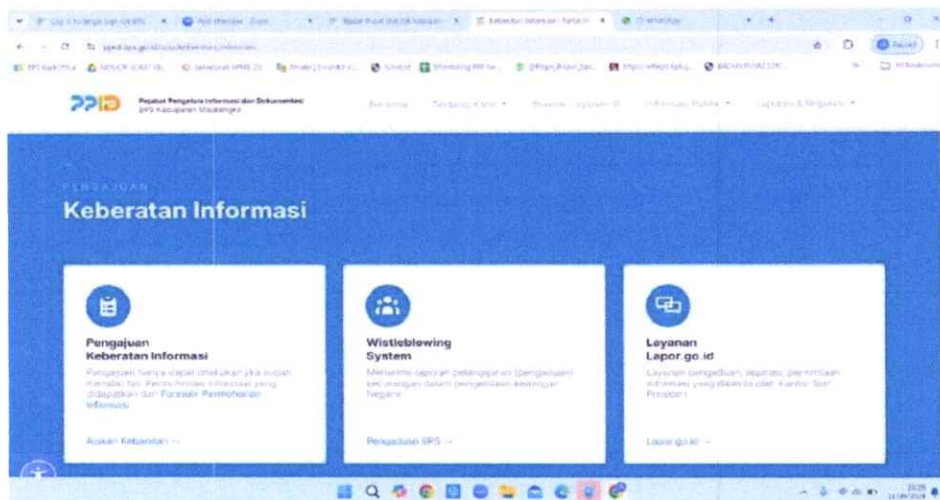
Gambar 11. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Kuningan

2.4.9. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Cirebon



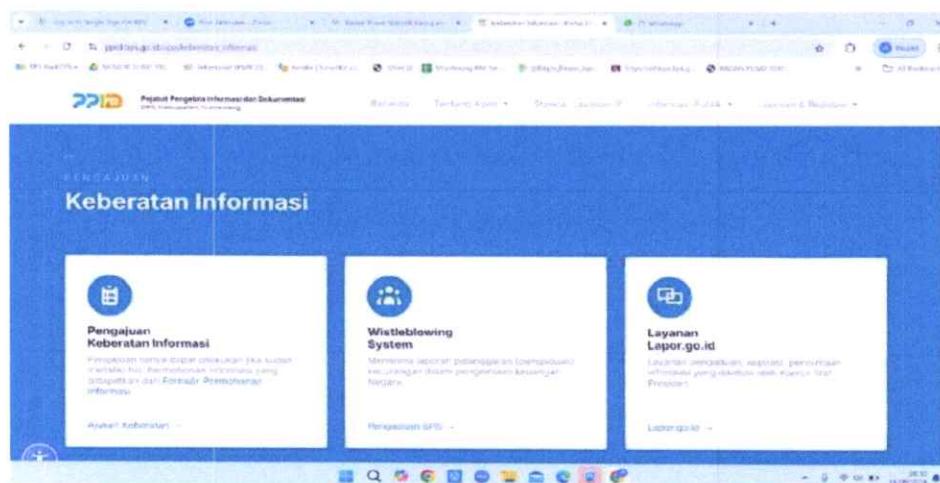
Gambar 12. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Cirebon

2.4.10. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Majalengka



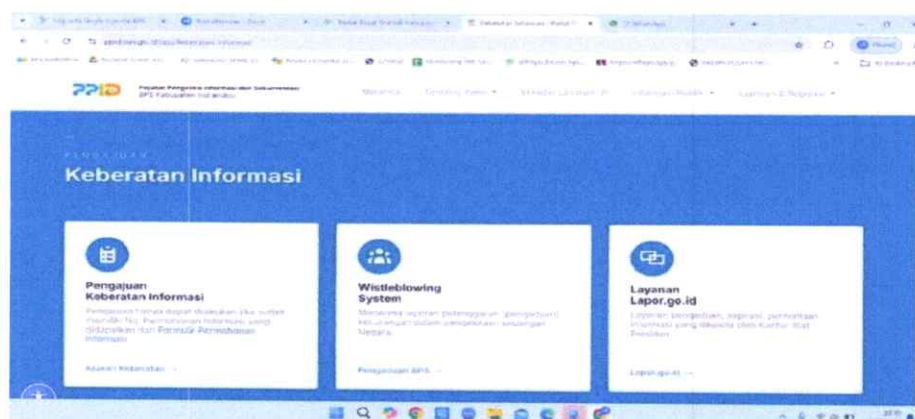
Gambar 13. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Majalengka

2.4.11. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Sumedang



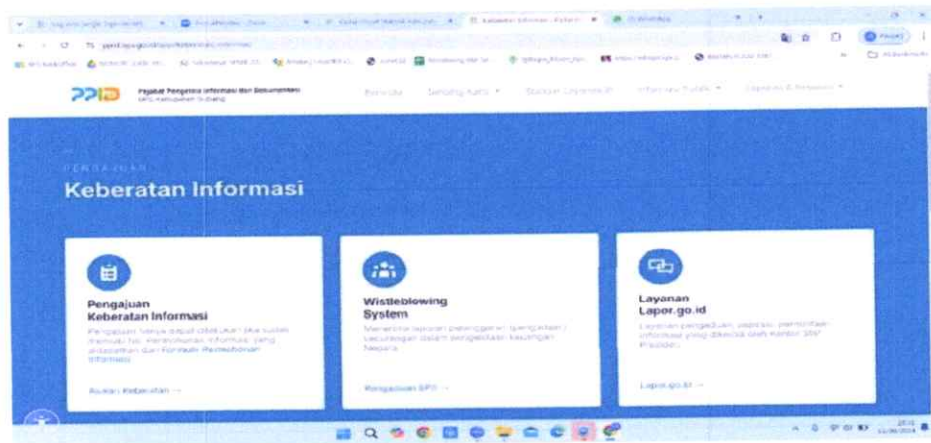
Gambar 14. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Sumedang

2.4.12. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Indramayu



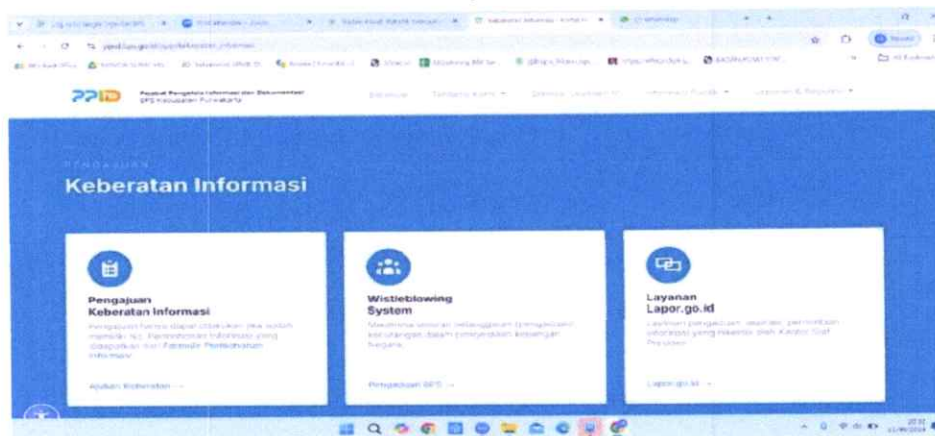
Gambar 15. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Indramayu

2.4.13. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Subang



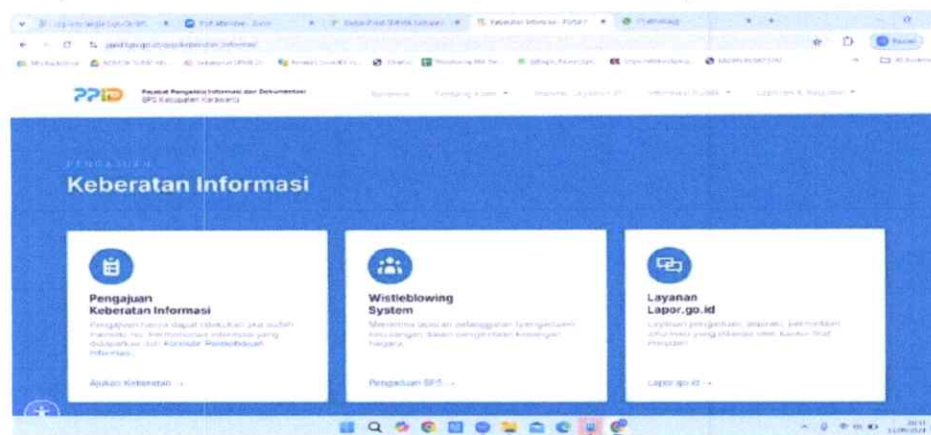
Gambar 16. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Subang

2.4.14. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Purwakarta



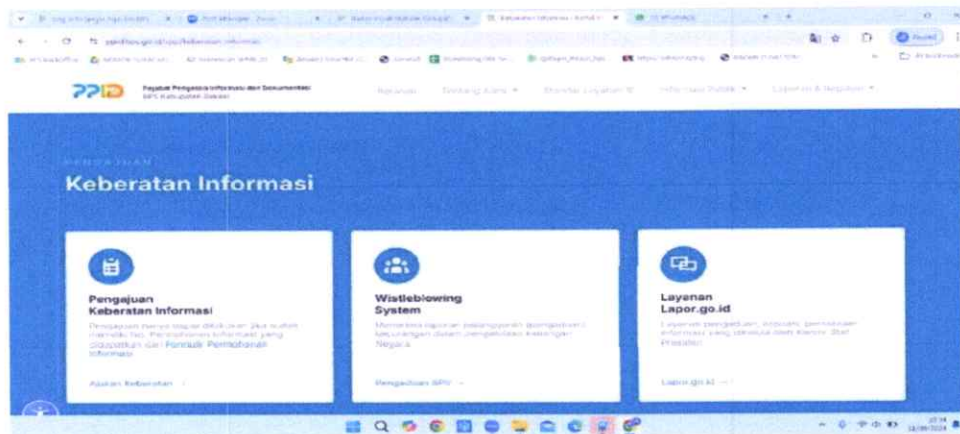
Gambar 17. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Purwakarta

2.4.15. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Karawang



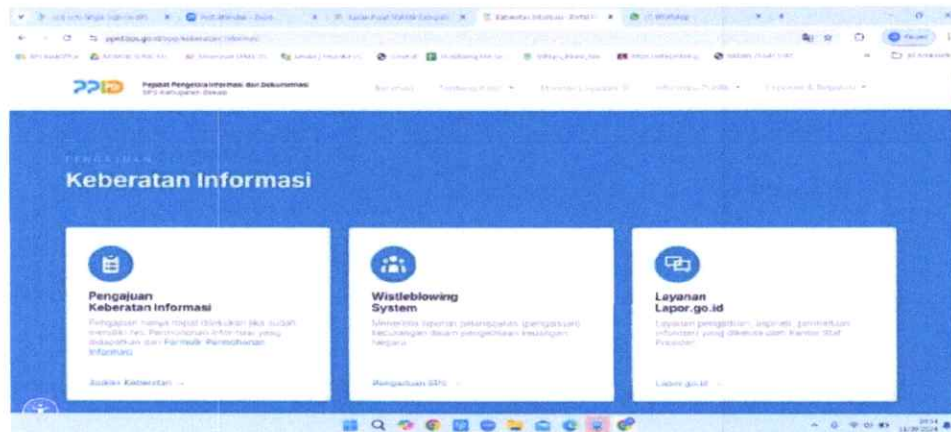
Gambar 18. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Karawang

2.4.16. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bekasi



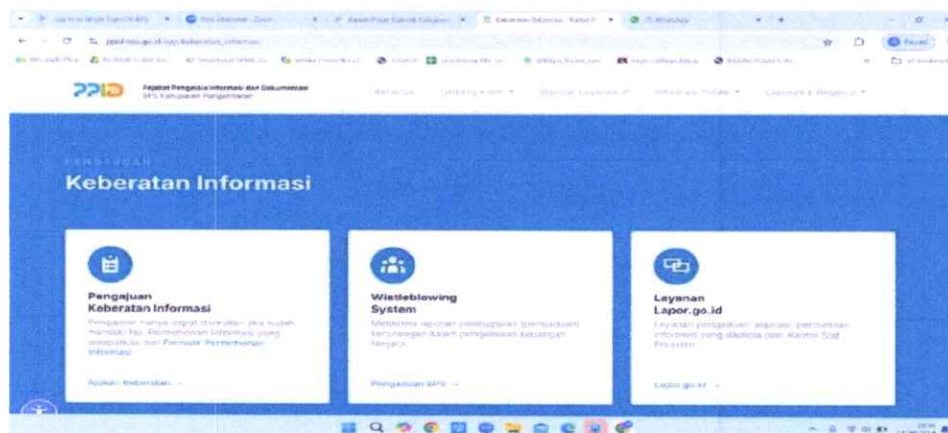
Gambar 19. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Bekasi

2.4.17. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Bandung Barat



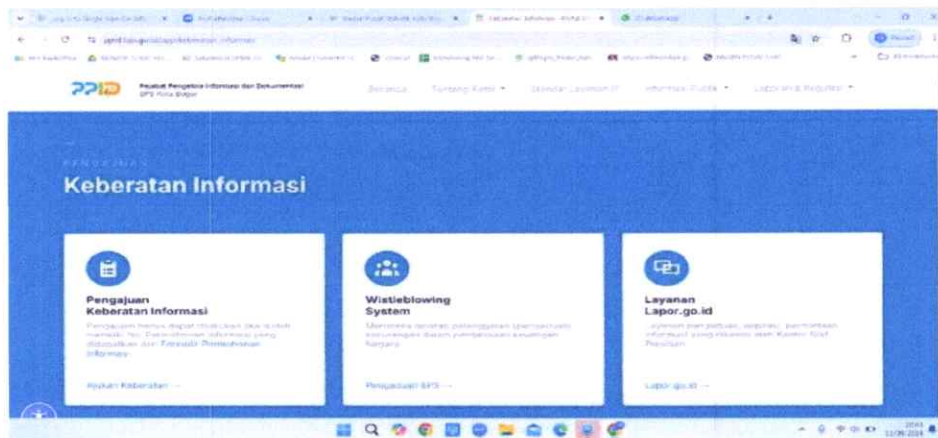
Gambar 20. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Bandung Barat

2.4.18. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kabupaten Pangandaran



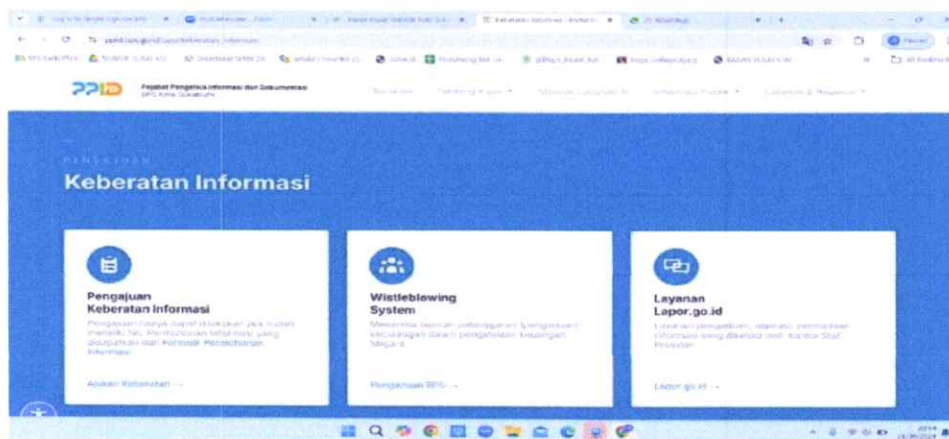
Gambar 21. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kabupaten Pangandaran

2.4.19. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bogor



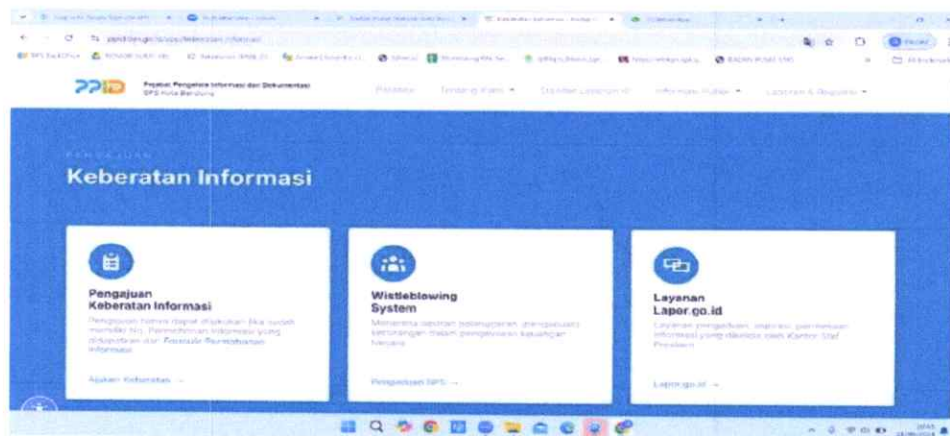
Gambar 22. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Bogor

2.4.20. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Sukabumi



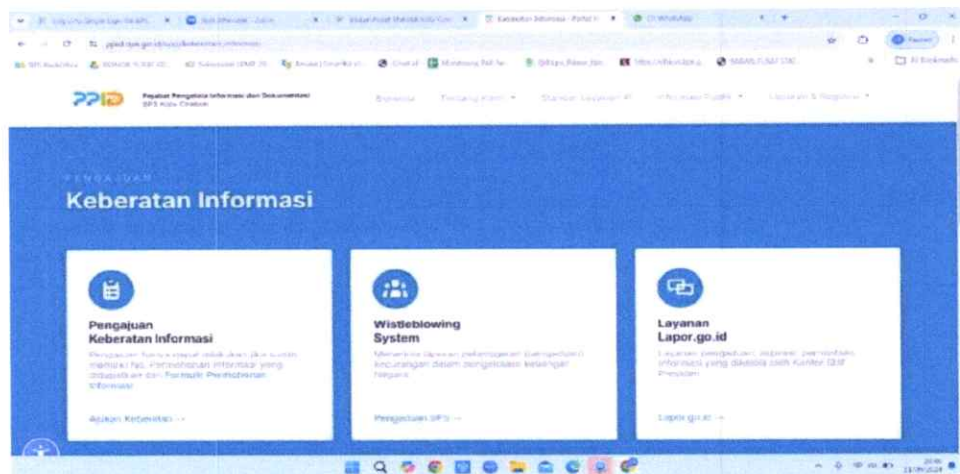
Gambar 23. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Sukabumi

2.4.21. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bandung



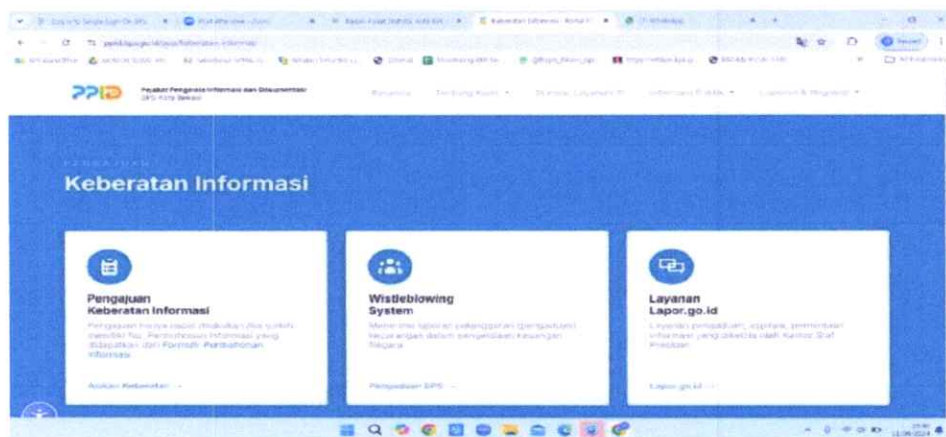
Gambar 24. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Bandung

2.4.22. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Cirebon



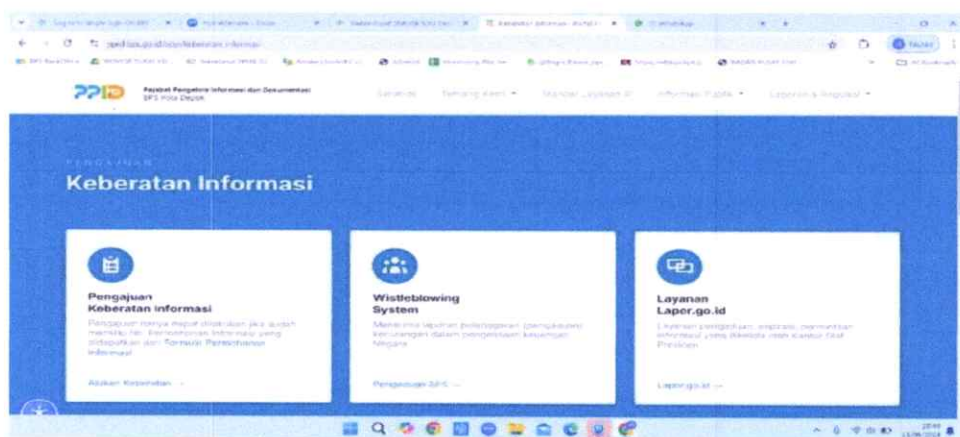
Gambar 25. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Cirebon

2.4.23. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Bekasi



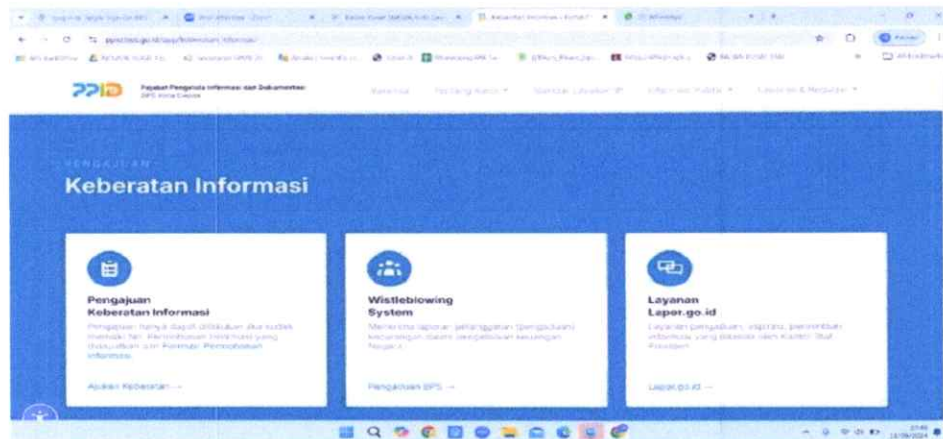
Gambar 26. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Bekasi

2.4.24. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Depok



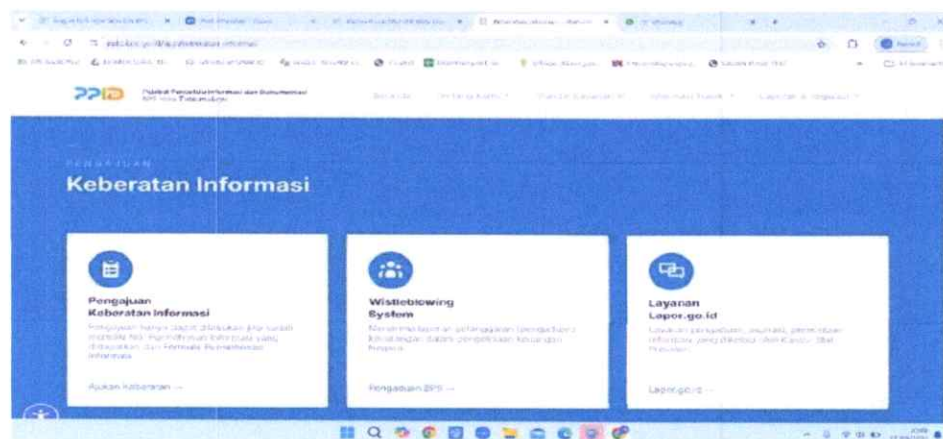
Gambar 27. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Depok

2.4.25. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Cimahi



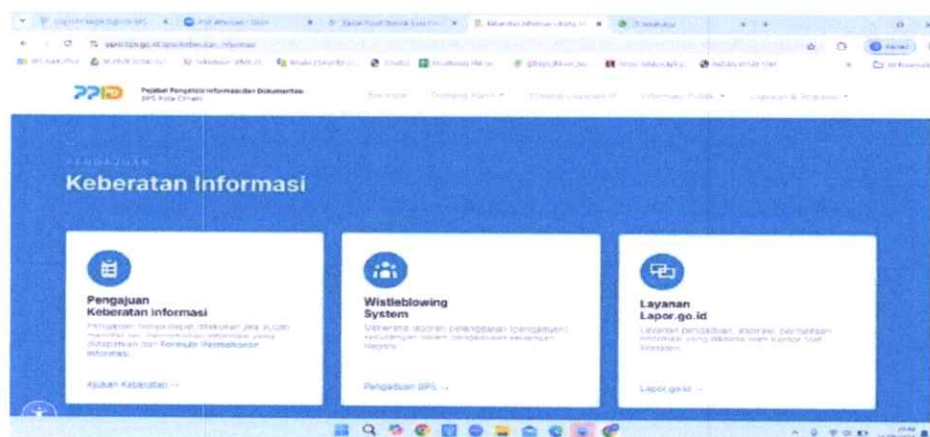
Gambar 28. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Cimahi

2.4.26. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Tasikmalaya



Gambar 29. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Tasikmalaya

2.4.27. Sosialisasi SP4N LAPOR! BPS Kota Banjar



Gambar 30. Sosialisasi SP4N LAPOR! Melalui *website* PPID BPS Kota Banjar

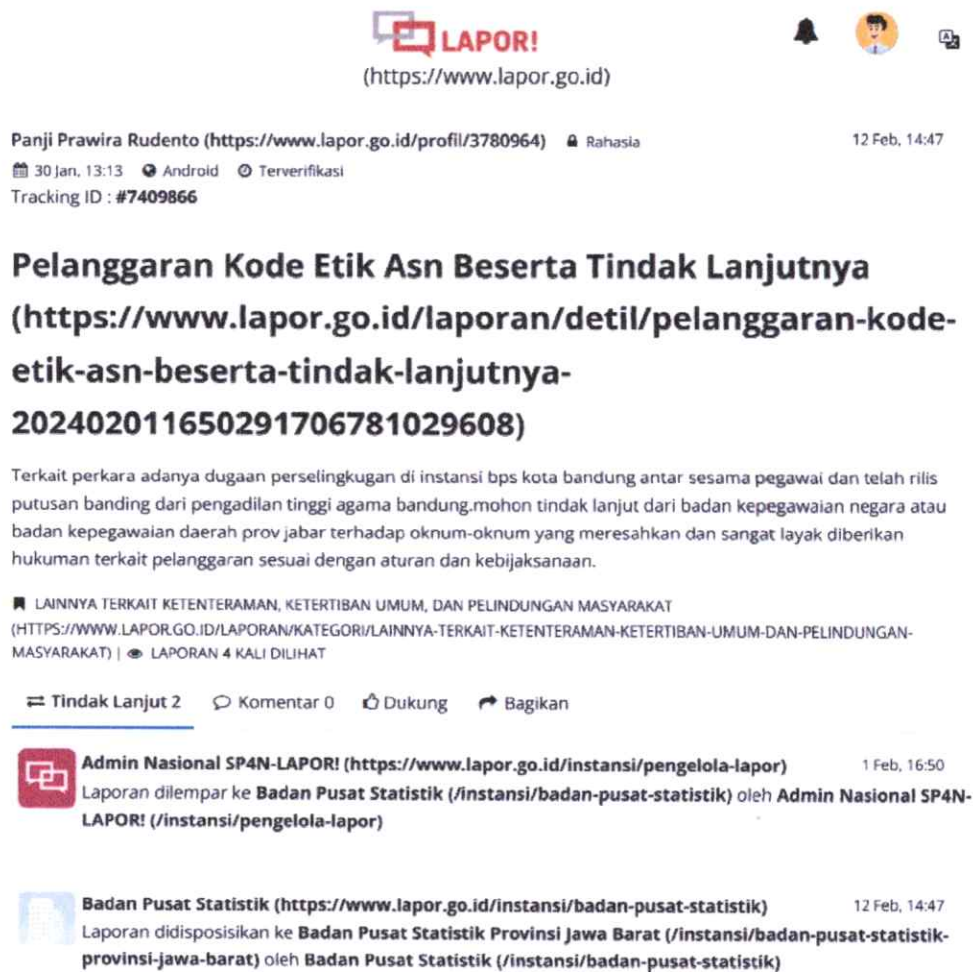
BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

3.1. Jumlah Laporan

Selama periode Tahun 2024 hanya ada 2 (dua) laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke SP4N LAPOR! . Adapun laporan tersebut yaitu :

1. Pengaduan adanya dugaan perselingkuhan yang terjadi BPS Kota Bandung



Gambar 4. Tampilan Status Laporan Pengaduan Perselingkuhan di BPS Kota Bandung melalui SP4N LAPOR!

2. Pengaduan mengenai ketersediaan data di website BPS Kota Cirebon

Terdisposisi ke **3200 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat**
Tracking ID : #7917817

Data Email Dan Website Di Pemkot Cirebon Yang Disediakan Bps Kota Cirebon

<https://cirebonkota.bps.go.id/statictabler/2024/03/04/175/daftar-website-dan-email-perangkat-daerah-di-kota-cirebon-2022.html>

mohon diperbarui, dengan data terbaru, terima kasih, lengkapi lagi jika bisa, email unit kerja kelurahan, puskesmas, dan sekolah dasar.

INFORMASI TERKAIT APLIKASI PEMERINTAH | LAPORAN 29 KALI DILIHAT



Tindak Lanjut 2 | Komentar 0 | Dukung | Bagikan

 Badan Pusat Statistik Laporan didisposisikan ke 3200 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat oleh Badan Pusat Statistik	1 Jul 2024, 13:24
 Anonim	1 Jul 2024, 13:26

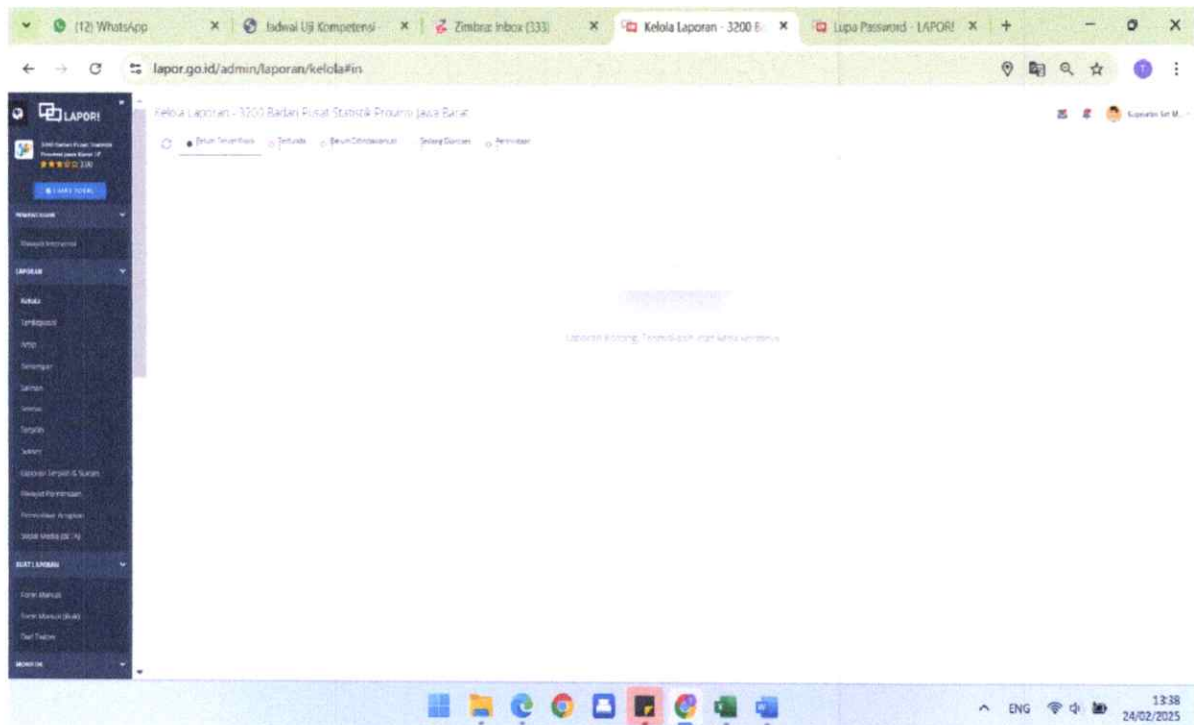
 Minta datanya ke ddis kota Cirebon

 3200 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas perhatian konsumen data BPS Kota Cirebon. Atas keluhan yang Saudara sampaikan, kami sampaikan bahwa : BPS Kota Cirebon akan memperbaiki data tersebut setelah berkoordinasi dengan Wali Data Pemerintah Kota Cirebon yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon karena data-data tersebut bersumber dari data sekunder dari Pemda Kota Cirebon	4 Jul 2024, 16:11
Ubah Hapus	

Gambar 5. Tampilan Status Laporan Pengaduan Ketersediaan Data di Website BPS Kota Cirebon melalui SP4N LAPOR!

3.2. Penanganan Pengaduan

Penanganan pelaporan SP4N LAPOR! pada website Laporm.go.id di BPS Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2024 sudah direspon dalam rentang waktu yang ditentukan.



Gambar 6. Tampilan Status Pengelolaan Pengaduan di Website SP4N LAPOR!



Gambar 7. Penanganan Laporan di BPS Provinsi Jawa Barat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penanganan laporan dari masyarakat di BPS Provinsi Jawa Barat melalui SP4N LAPOR! pada Tahun 2024 sudah ditangani atau di respon dengan cepat. Jumlah pelaporan hanya ada 2 laporan dan tidak ada pelaporan melalui website dan media sosial BPS Provinsi Jawa Barat.

4.2. Hambatan dan Saran

Meskipun sosialisasi dan internalisasi sudah dilakukan baik internal maupun kepada eksternal melalui media sosial dan website BPS Provinsi Jawa Barat, namun jumlah pelaporan di semester I Tahun 2024 masih sedikit. Untuk itu masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas lagi atau lebih intens agar masyarakat lebih memahami adanya kanal-kanal pelaporan yang terkait pelayanan publik.